



LURAH NGLEGI
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGLEGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGLEGI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGLEGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan Nglegi Nomor 6 Tahun 2022 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kalurahan Nglegi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

- Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Nglegi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020 Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Nglegi Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Nglegi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Nglegi Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Nglegi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Nglegi Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Nglegi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
21. Peraturan Kalurahan Nglegi Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Nglegi Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Nglegi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Nglegi Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLEGI
dan
LURAH NGLEGI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Pendapatan Asli Kalurahan	:	Rp. 14,747,724
b. Transfer	:	Rp. 2.119.266.900
c. Pendapatan Lain-lain	:	Rp. 1.835.720
Jumlah Pendapatan Kalurahan	:	Rp. 2.135.850.344
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp. 891.333.102
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	:	Rp. 749.896.200
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	:	Rp. 24.244.900
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	:	Rp. 300.089.500
e. Belanja Tak Terduga	:	Rp. 110.900.000
Jumlah Belanja Kalurahan	:	Rp. 2.076.463.702
Surplus/(Defisit)	:	Rp. 59.386.642
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 108.165.708
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp. 50,000,000
Selisih Pembiayaan (a - b)	:	Rp. 58.165.708
SILPA tahun berjalan	:	Rp. 117.552.350

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2023;
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program lainnya yang masuk Ke Desa Tahun Anggaran 2023;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Nglegi.

Ditetapkan di Nglegi
pada tanggal 26 Januari 2024



Diundangkan di Nglegi
pada tanggal 26 Januari 2024

CARIK,

KUNCORO KRESNO

LEMBARAN KALURAHAN NGLEGI TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN KALURAHAN NGLEGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Kalurahan Nglegi Kapanewon Patuk
Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2023

Daftar Isi

	halaman
I Laporan Realisasi APBDes	1
II Catatan Atas Laporan Keuangan	2
A. Informasi Umum	2
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	2
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	2
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas	2
2. Pendapatan Asli Desa	2
3. Dana Desa	2
4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	2
5. Alokasi Dana Desa	2
6. Bantuan Keuangan Propinsi	3
7. Bantuan Keuangan Kabupaten	3
8. Pendapatan Lain	3
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	3
10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	3
11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	3
12 Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	3
13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	3
14 Belanja Desa Dalam Klasifikasi Ekonomi	3
15 Belanja Desa Dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	4
16 Pembiayaan	5
17 Aset Desa	5
18 Penyertaan Modal Desa	5

Lampiran

Lampiran 1 -Laporan Keuangan

Lampiran 2 - Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember TA 2023

Lampiran 3 - Program Sektoral, Program Daerah, dan Program lainnya yang Masuk ke Desa TA 2023

LAPORAN REALISASI APB KALURAHAN

PEMERINTAH KALURAHAN NGLEGI

KAPANEWON PATUK

KABUPATEN GUNUNGGIDUL

TAHUN ANGGARAN 2023

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C.2	Rp 14,747,724.00	Rp 14,747,724.00	Rp -
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C.3	Rp 1,028,521,000.00	Rp 1,028,521,000.00	Rp -
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	Rp 67,652,300.00	Rp 73,697,300.00	-Rp 6,045,000.00
Alokasi Dana Desa	C.5	Rp 751,501,400.00	Rp 747,331,100.00	Rp 4,170,300.00
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	Rp 100,000,000.00	Rp 99,867,000.00	Rp 133,000.00
Bantuan Keuangan Kabupaten	C.7	Rp 169,850,500.00	Rp 169,850,500.00	Rp -
Pendapatan Lain	C.8	Rp 1,500,000.00	Rp 1,835,720.00	-Rp 335,720.00
JUMLAH PENDAPATAN		Rp 2,133,772,924.00	Rp 2,135,850,344.00	-Rp 2,077,420.00
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	C.9 Dan C.15	Rp 909,490,688.00	Rp 891,333,102.00	Rp 18,157,586.00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 Dan C.15	Rp 792,326,375.00	Rp 749,896,200.00	Rp 42,430,175.00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 Dan C.15	Rp 26,494,924.00	Rp 24,244,900.00	Rp 2,250,024.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 Dan C.15	Rp 314,715,245.00	Rp 300,089,500.00	Rp 14,625,745.00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 Dan C.15	Rp 128,911,400.00	Rp 110,900,000.00	Rp 18,011,400.00
JUMLAH BELANJA	C.14	Rp 2,171,938,632.00	Rp 2,076,463,702.00	Rp 95,474,930.00
SURPLUS / (DEFISIT)	C.15	-Rp 38,165,708.00	Rp 59,386,642.00	-Rp 97,552,350.00
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		Rp 108,165,708.00	Rp 108,165,708.00	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan		Rp 70,000,000.00	Rp 50,000,000.00	Rp 20,000,000.00
SELISIH PEMBIAYAAN		Rp 38,165,708.00	Rp 58,165,708.00	-Rp 20,000,000.00
SILPA TAHUN BERJALAN		Rp 0.00	Rp 117,552,350.00	-Rp 117,552,350.00

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kalurahan Nglegi
Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2023

A. Informasi Umum

Pemerintah Kalurahan Nglegi merupakan kalurahan di Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan keputusan Bupati No. 141/136/KPTS/2019 Tanggal 30 Desember 2019, saat ini kepengurusan Kalurahan Nglegi terdiri dari :

1. Lurah : WASDIYANTA
2. Carik : KUNCORO KRESNO
3. Danarta : ANA RACHMATUN

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan kalurahan berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2023	Rp	117,552,350.00
Mutasi Potongan Pajak		
Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	Rp	-
Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	Rp	94,169,231.00
Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	Rp	94,169,231.00
Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	Rp	-
Saldo Kas per 31 Desember 2023	Rp	117,552,350.00

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
a. Hasil Usaha	Rp 3,762,500.00	Rp 3,762,500.00	Rp -
b. Hasil Aset	Rp 4,314,000.00	Rp 4,314,000.00	Rp -
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong I	Rp -	Rp -	Rp -
d. PADesa Lain	Rp 6,671,224.00	Rp 6,671,224.00	Rp -
	Rp 14,747,724.00	Rp 14,747,724.00	Rp -

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2023 Adalah sebagai berikut:

Tahap	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Tahap 1 Non BLT	Rp 308,556,300	Rp 308,556,300	Rp -
BLT I	Rp 26,100,000	Rp 26,100,000	Rp -
BLT II	Rp 26,100,000	Rp 26,100,000	Rp -
Tahap 2 Non BLT	Rp 308,556,300	Rp 308,556,300	Rp -
BLT III	Rp 26,100,000	Rp 26,100,000	Rp -
Tahap 3 Non BLT	Rp 307,008,400	Rp 307,008,400	Rp -
BLT IV	Rp 26,100,000	Rp 26,100,000	Rp -
	Rp 1,028,521,000	Rp 1,028,521,000.00	Rp -

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

a. Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah:

Tahap	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Tahap 1	Rp 33,826,150.00	Rp 33,826,150.00	Rp -
Tahap 2	Rp 33,826,150.00	Rp 33,826,150.00	Rp -
	Rp 67,652,300.00	Rp 67,652,300.00	Rp -

b. Penerimaan Desa dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2022 adalah:

Kekurangan Pajak Daerah 2022	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
	Rp -	Rp 6,045,000.00	-Rp 6,045,000.00
	Rp -	Rp 6,045,000.00	-Rp 6,045,000.00

c. Penerimaan Desa dari bagian dari hasil penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
	-	-	-
	-	-	-

5. Alokasi Dana Desa

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

Tahap	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Tahap 1	Rp 62,625,116.67	Rp 62,277,250.00	Rp 347,866.67
Tahap 2	Rp 62,625,116.67	Rp 62,277,250.00	Rp 347,866.67
Tahap 3	Rp 62,625,116.67	Rp 62,277,250.00	Rp 347,866.67
Tahap 4	Rp 62,625,116.67	Rp 62,277,250.00	Rp 347,866.67
Tahap 5	Rp 62,625,116.67	Rp 62,277,250.00	Rp 347,866.67
Tahap 6	Rp 62,625,116.67	Rp 62,277,250.00	Rp 347,866.67
Tahap 7	Rp 62,625,116.67	Rp 62,277,250.00	Rp 347,866.67
Tahap 8	Rp 62,625,116.67	Rp 62,277,250.00	Rp 347,866.67
Tahap 9	Rp 62,625,116.67	Rp 62,277,250.00	Rp 347,866.67
Tahap 10	Rp 62,625,116.67	Rp 62,277,250.00	Rp 347,866.67
Tahap 11	Rp 62,625,116.67	Rp 62,277,250.00	Rp 347,866.67
Tahap 12	Rp 62,625,116.67	Rp 62,281,350.00	Rp 343,766.67
	Rp 751,501,400.00	Rp 747,331,100.00	Rp 4,170,300.00

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi DIY adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
BKK Penanda Keistimewaan	Rp 100,000,000.00	Rp 99,867,000.00	-Rp 133,000.00
	100,000,000	99,867,000	133,000
- Pengembalian Anggaran BKK ke RKUD DIY		Rp 133,000.00	

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Gunungkidul adalah:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
BKK Kabupaten	Rp 169,850,500.00	Rp 169,850,500.00	Rp -
.....	Rp 169,850,500.00	Rp 169,850,500.00	Rp -

8. Pendapatan Lain

Pendapatan Lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama ant	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan dari hasil kerjasama	Rp -	Rp -	Rp -
Desa dengan pihak ketiga			
Penerimaan dari bantuan	Rp -	Rp -	Rp -
perusahaan yang berlokasi di Desa			
Hibah dan sumbangan dari pihak ke	Rp -	Rp -	Rp -
Koreksi kesalahan belanja tahun-	Rp -	Rp -	Rp -
tahun anggaran sebelumnya yang			
mengakibatkan penerimaan di kas			
Bunga Bank	Rp 1,500,000.00	Rp 1,835,720.00	-Rp 335,720.00
Pendapatan Lain Desa yang sah	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 1,500,000.00	Rp 1,835,720.00	-Rp 335,720.00

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Pegawai	Rp 709,004,500	Rp 703,648,300	Rp 5,356,200.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 174,720,188	Rp 161,918,802	Rp 12,801,386.00
Belanja Modal	Rp 25,766,000	Rp 25,766,000	Rp -
	Rp 909,490,688.00	Rp 891,333,102.00	Rp 18,157,586.00

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 348,822,775.00	Rp 347,603,900.00	Rp 1,218,875.00
Belanja Modal	Rp 443,503,600.00	Rp 402,292,300.00	Rp 41,211,300.00
	Rp 792,326,375.00	Rp 749,896,200.00	Rp 42,430,175.00

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 26,494,924.00	Rp 24,244,900.00	-Rp 2,250,024.00
Belanja Modal	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 26,494,924.00	Rp 24,244,900.00	-Rp 2,250,024.00

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 93,400,245.00	Rp 82,600,000.00	Rp 10,800,245.00
Belanja Modal	Rp 221,315,000.00	Rp 217,489,500.00	Rp 3,825,500.00
	Rp 314,715,245.00	Rp 300,089,500.00	Rp 14,625,745.00

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Belanja untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Modal	Rp -	Rp -	Rp -
Belanja Tidak Terduga	Rp 128,911,400	Rp 110,900,000	Rp 18,011,400.00
Lain - lain	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 128,911,400.00	Rp 110,900,000.00	Rp 18,011,400.00
	128,911,400.00	110,900,000.00	

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan	Rp 42,260,100.00	Rp 42,260,100.00	Rp -
Tunjangan Kepala Desa			
Penghasilan Tetap dan	Rp 571,440,000.00	Rp 566,907,000.00	Rp 4,533,000.00
Tunjangan Perangkat Desa			
Jaminan Kesehatan Kepala	Rp 41,354,400.00	Rp 40,531,200.00	Rp 823,200.00
Desa dan Perangkat Desa			
Tunjangan BPD	Rp 53,950,000.00	Rp 53,950,000.00	Rp -
	Rp 709,004,500.00	Rp 703,648,300.00	Rp 5,356,200.00

Belanja Barang dan Jasa					
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	Rp	126,373,132.00	Rp	118,404,450.00	Rp 7,968,682.00
Belanja Jasa Honorarium	Rp	219,183,000.00	Rp	209,653,000.00	Rp 9,530,000.00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp	5,500,000.00	Rp	2,510,000.00	Rp 2,990,000.00
Belanja Jasa Sewa	Rp	39,400,000.00	Rp	36,400,000.00	Rp 3,000,000.00
Belanja Operasional	Rp	28,272,500.00	Rp	26,103,152.00	Rp 2,169,348.00
Belanja Pemeliharaan	Rp	4,960,000.00	Rp	4,110,000.00	Rp 850,000.00
Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	Rp	219,749,500.00	Rp	219,187,000.00	Rp 562,500.00
	Rp	643,438,132.00	Rp	616,367,602.00	Rp 27,070,530.00

Belanja Modal					
Belanja Modal Pengadaan	Rp	12,500,000.00	Rp	12,500,000.00	Rp -
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	Rp	9,300,000.00	Rp	9,300,000.00	Rp -
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	237,420,300.00	Rp	200,345,500.00	Rp 37,074,800.00
Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	Rp	404,464,300.00	Rp	399,829,800.00	Rp 4,634,500.00
Belanja Modal Lainnya	Rp	26,900,000.00	Rp	23,572,500.00	Rp 3,327,500.00
	Rp	690,584,600.00	Rp	645,547,800.00	Rp 45,036,800.00

Belanja Tidak Terduga					
Belanja Tidak Terduga	Rp	128,911,400.00	Rp	110,900,000.00	Rp 18,011,400.00
	Rp	128,911,400.00	Rp	110,900,000.00	Rp 18,011,400.00

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan & operasional pemerintah desa	Rp	828,196,724.00	Rp 819,254,772.00	Rp 8,941,952.00
Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp	9,220,263.00	Rp 8,329,000.00	Rp 891,263.00
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp	30,621,100.00	Rp 22,691,050.00	Rp 7,930,050.00
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp	28,452,601.00	Rp 28,452,600.00	Rp 1.00
Sub Bidang Pertanahan	Rp	13,000,000.00	Rp 12,605,680.00	Rp 394,320.00
	Rp	909,490,688.00	Rp 891,333,102.00	Rp 18,157,586.00
Bidang Pembangunan Desa				
Sub Bidang Pendidikan	Rp	59,363,300.00	Rp 59,253,500.00	Rp 109,800.00
Sub Bidang Kesehatan	Rp	99,414,900.00	Rp 99,414,900.00	Rp -
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	452,525,800.00	Rp 447,900,300.00	Rp 4,625,500.00
Sub Bidang Kawasan	Rp	53,035,375.00	Rp 52,811,500.00	Rp 223,875.00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp	-	Rp -	Rp -
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp	1,200,000.00	Rp 544,000.00	Rp 656,000.00
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp	-	Rp -	Rp -
Sub Bidang Pariwisata	Rp	126,787,000.00	Rp 89,972,000.00	Rp 36,815,000.00
	Rp	792,326,375.00	Rp 749,896,200.00	Rp 42,430,175.00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Rp	6,762,624.00	Rp 6,762,600.00	Rp 24.00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp	2,675,000.00	Rp 1,675,000.00	Rp 1,000,000.00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	3,412,500.00	Rp 3,412,500.00	Rp -
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp	13,644,800.00	Rp 12,394,800.00	Rp 1,250,000.00
	Rp	26,494,924.00	Rp 24,244,900.00	Rp 2,250,024.00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp	255,860,000.00	Rp	252,119,500.00	Rp	3,740,500.00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp	9,000,000.00	Rp	9,000,000.00	Rp	-
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp	6,900,000.00	Rp	-	Rp	6,900,000.00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp	42,955,245.00	Rp	38,970,000.00	Rp	3,985,245.00
	Rp	314,715,245.00	Rp	300,089,500.00	Rp	14,625,745.00

Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa						
Sub Bidang Penanggulangan Bencana					Rp	-
Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp	24,511,400.00	Rp	6,500,000.00	Rp	18,011,400.00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp	104,400,000.00	Rp	104,400,000.00	Rp	-
	Rp	128,911,400.00	Rp	110,900,000.00	Rp	18,011,400.00

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Penerimaan Pembiayaan	Rp 108,165,708.00	Rp 108,165,708.00	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 70,000,000.00	Rp 50,000,000.00	Rp 20,000,000.00
	Rp 38,165,708.00	Rp 58,165,708.00	Rp 20,000,000.00
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	Rp 108,165,708.00	Rp 108,165,708.00	Rp -
2. Pencairan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 108,165,708.00	Rp 108,165,708.00	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -
2. Penyertaan Modal Desa	Rp 70,000,000.00	Rp 50,000,000.00	Rp 20,000,000.00
	Rp 70,000,000.00	Rp 50,000,000.00	Rp 20,000,000.00

17. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut :

	2022	2023	(Lebih)/ Kurang
Tanah	Rp 286,987,200.00	Rp 299,487,200.00	Rp 12,500,000.00
Peralatan dan Mesin	Rp 252,259,491.00	Rp 324,759,491.00	Rp 72,500,000.00
Gedung dan Bangunan	Rp 1,333,034,056.00	Rp 1,533,379,556.00	Rp 200,345,500.00
Jalan Jaringan dan Irigasi	Rp 3,559,323,092.00	Rp 4,098,725,392.00	Rp 539,402,300.00
Aset Tetap Lainnya	Rp 149,984,109.00	Rp 149,984,109.00	Rp -
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 5,581,587,948.00	Rp 6,406,335,748.00	Rp 824,747,800.00

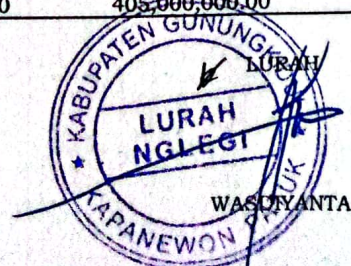
Catatan :

- Kesalahan klasifikasi belanja pada modal lainnya sebesar Rp. 23.572.500,- pada kegiatan ketahanan pangan, seharusnya masuk kedalam klasifikasi aset belanja modal Jalan Jaringan dan Irigasi
- Tambahan Aset untuk Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 116.000.000,- Kegiatan Hibah Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) dari bidang Cipta Karya DPUPRKP Kab Gunungkidul TA. 2023 Kepada KPSPAM Padangan Kembang
- Tambahan Aset pada Peralatan dan Mesin berupa Antropometri Kit 10 sejumlah 8 paket dengan harga per paket Rp. 7.900.000,- Dari Dinas Kesehatan Kab. Gunungkidul. Total Harga Aset Rp. 63.200.000,-.

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut:

	2022	2023	(Lebih)/ Kurang
BUMDes "MAJUDADI"	355,000,000.00	355,000,000.00	-
BUMKALMA	-	50,000,000.00	50,000,000.00
	355,000,000.00	405,000,000.00	50,000,000.00



LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

KALURAHAN : NGLEGI
KAPANEWON : PATUK
KABUPATEN : GUNUNGGIDUL
PROVINSI : D.I. YOGYAKARTA

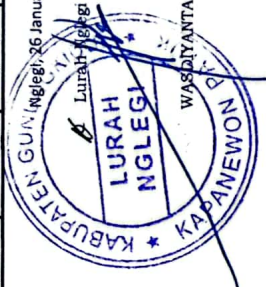
KODE REK	URAIAN	NAMA OUPUT	RENCANA						REALISASI						SUMBER DANA					
			RENCANA			REALISASI			PAD	DANA DESA	ADD	BHP/R	PBK	PBP	DLL					
			VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN								CAPAIAN				
1	PENDAPATAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.	Pendapatan Asli Desa				14,747,724			14,747,724	100%											
4.1.1.	Hasil Usaha Desa				3,762,500			3,762,500	100%	3,762,500										
4.1.2.	Hasil Aset Desa				4,314,000			4,314,000	100%	4,314,000										
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa				6,671,224			6,671,224	100%	6,671,224										
4.2.	Pendapatan Transfer				2,117,525,200			2,119,266,900	100%											
4.2.1.	Dana Desa				1,028,521,000			1,028,521,000	100%		1,028,521,000									
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				67,652,300			73,697,300	109%				73,697,300							
4.2.3.	Alokasi Dana Desa				751,501,400			747,331,100	99%		747,331,100									
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi				100,000,000			99,867,000	100%					99,867,000						
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota				169,850,500			169,850,500	100%					169,850,500						
4.3.	Pendapatan Lain-lain				1,500,000			1,835,720	122%											
4.3.6.	Bunga Bank				1,500,000			1,835,720	122%							1,835,720				
	JUNTAH PENDAPATAN				2,133,772,924			2,135,850,344	100%	14,747,724	1,028,521,000	747,331,100	73,697,300	169,850,500	99,867,000	1,835,720				
2.	BELANJA																			
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				909,490,688			891,333,102	98%											
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				828,196,724			819,254,772	99%											
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Terbayarnya siltap dan tunjangan	12	OB	42,260,100	12	OB	42,260,100	100%			41,160,000	1,100,100							
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Terbayarnya siltap, tunjangan param	12	OB	571,440,000	12	OB	566,907,000	99%			551,307,000	15,600,000							
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terbayarnya jaminan sosial bagi lu	12	OB	41,354,400	12	OB	40,531,200	98%			40,531,200								
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK	Operasional pemkal berjalan lance	12	Bulan	66,364,032	12	Bulan	62,778,472	95%			37,380,928	22,800,000							
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	Terbayarnya tunjangan bamuskal	12	Bulan	53,950,000	12	Bulan	53,950,000	100%			53,950,000								
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Serag	Lancarnya kegiatan bamuskal	12	Bulan	2,668,192	12	Bulan	2,668,000	100%			2,668,000								

1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Terbaranya Insentif/ Operasional	12 Bulan	20,160,000	12 Bulan	20,160,000	100%	20,160,000		20,160,000
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Melancarkan kegiatan pemerintah	3 Paket	30,000,000	3 Paket	30,000,000	100%	30,000,000		
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			9,220,263		8,329,000	90%	3,000,000		
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Terbangunnya sarana kantor desa	1 Paket	4,097,763	1 Paket	4,057,000	99%			
1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	1 Paket	1,522,500	1 Paket	1,097,000	72%			1,097,000
1.2.95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	1 Paket	3,600,000	1 Paket	3,175,000	88%			3,175,000
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			30,621,100		22,691,050	74%			
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Penataharian Profil Desa **)	Tersusunnya profil desa yang valid	1 Paket	15,381,100	1 Paket	7,451,050	48%			7,451,050
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Tertibnya administrasi kearsipan p	1 Paket	2,400,000	1 Paket	2,400,000	100%			2,400,000
1.3.90	Penyusunan Monografi Desa	Tersusunnya monografi desa	1 Paket	3,325,000	1 Paket	3,325,000	100%			3,325,000
1.3.91	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	Tertaksananya pendataan keluarga	1 Paket	9,515,000	1 Paket	9,515,000	100%			9,515,000
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			28,452,601		28,452,600	100%			
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	Tersusunnya RKPkal	1 Paket	3,125,000	1 Paket	3,125,000	100%			3,125,000
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes, Perubahan, LP)	Tersusunnya dokumen keuangan des	1 Paket	3,650,000	1 Paket	3,650,000	100%			3,650,000
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy	Tersusunnya laporan lurah, LPPkal	1 Paket	3,077,601	1 Paket	3,077,600	100%			3,077,600
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Bertumbuhnya informasi desa	12 OB	15,500,000	12 OB	15,500,000	100%			15,500,000
1.4.90	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPI dan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan bu	1 Laporan	3,100,000	1 Laporan	3,100,000	100%			2,450,000
1.5	Sub Bidang Pertanian			13,000,000		12,605,680	97%			650,000
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Tertibnya administrasi PBB	1 LS	500,000	1 LS	105,680	21%			105,680
1.5.91	Sertifikasi Tanah Milik Desa	Tersertifikasinya tanah milik kalur	1 Bidang	12,500,000	1 Bidang	12,500,000	100%			12,500,000
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			792,326,375		749,896,200	95%			
2.1	Sub Bidang Pendidikan			59,363,300		59,253,500	100%			
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik De	Lancarnya penyelenggaraan PAUD	12 Bulan	32,500,000	12 Bulan	32,500,000	100%			32,500,000
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Meningkatnya pendidik PAUD	1 Paket	2,000,000	1 Paket	2,000,000	100%			2,000,000
2.1.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan	Tersedianya prasarana perpustaka	1 Unit	24,863,300	1 Unit	24,753,500	100%			24,753,500
2.2	Sub Bidang Kesehatan			99,414,900		99,414,900	100%			
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsis, Insentif	Lancarnya penyelenggaraan posya	12 Bulan	44,520,000	12 Bulan	44,520,000	100%			44,520,000
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Lancarnya penyelenggaraan desa s	12 Bulan	9,025,000	12 Bulan	9,025,000	100%			9,025,000
2.2.90	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Terselenggaranya posbindu	1 Paket	3,289,900	1 Paket	3,289,900	100%			3,289,900
2.2.91	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Meningkatnya gerakan masyarakat	1 Paket	5,210,000	1 Paket	5,210,000	100%			5,210,000
2.2.94	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Meningkatnya gizi balita dan PAUD	12 Bulan	12,050,000	12 Bulan	12,050,000	100%			12,050,000
2.2.98	Insentif kader kesehatan/KB	Terbaranya insentif kader keseha	12 Bulan	25,320,000	12 Bulan	25,320,000	100%			25,320,000
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			452,525,800		447,900,300	99%			
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Lancarnya prasarana transportasi	3 Paket	272,575,300	3 Paket	268,385,300	98%			39,900,000
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,	Meningkatnya prasarana jalan des	30.06 M3	29,950,500	30.06 M3	29,854,000	100%			29,854,000
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kearsipank	Meningkatnya balai padukuhan	5 Paket	150,000,000	5 Paket	149,661,000	100%			49,794,000
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			53,035,375		52,811,500	100%			
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Lay	Meningkatnya rumah layak huni	10 Paket	53,035,375	10 Paket	52,811,500	100%			385,000

No	Uraian Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Unit Kegiatan	Volume	Unit Waktu	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)	Saldo Anggaran Lebih	Saldo Anggaran Lebih (%)	Saldo Anggaran Lebih (Rp)	Saldo Anggaran Lebih (%)	Saldo Anggaran Lebih (Rp)	Saldo Anggaran Lebih (%)	Saldo Anggaran Lebih (Rp)	Saldo Anggaran Lebih (%)	Saldo Anggaran Lebih (Rp)	Saldo Anggaran Lebih (%)	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika					1,200,000													
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Terlaksananya informasi publik ka	12 Bulan			1,200,000													
2.8	Sub Bidang Pariwisata					126,787,000													
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Terbangunnya sarana dan prasarana	1 Paket			118,362,000													
2.8.90	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	Berkembangnya desa wisata	1 Paket			3,025,000													
2.8.91	Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	Meningkatnya kapasitas pengelola	1 Paket			5,400,000													
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					26,494,924													
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					6,762,624													
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Masyarakat	Meningkatnya kapasitas tenaga ke	1 Paket			3,500,000													
3.1.90	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Meningkatnya kelembagaan desa	1 Paket			3,262,624													
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan					2,675,000													
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Lestarihnya kesenian dan budaya	12 Bulan			2,675,000													
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga					3,412,500													
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Terselenggaranya lomba olah raga	1 Paket			1,262,500													
3.3.93	Operasional Karang Taruna	Berjalannya kegiatan karang tarun	12 Bulan			2,150,000													
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat					13,644,800													
3.4.91	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Lancarnya kegiatan KPM	12 Bulan			6,050,000													
3.4.92	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKD)	Penanggulangan kemiskinan desa	12 Bulan			3,175,000													
3.4.95	Operasional LPMD dan/atau UPM	Melancarkannya kegiatan LPMD	12 Bulan			2,100,000													
3.4.96	Operasional PKK	Melancarkannya kegiatan PKK	12 OB			2,319,800													
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					314,715,245													
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan					255,860,000													
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Meningkatnya ketahanan pangan	1 Paket			205,860,000													
4.2.90	Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/secondaria	Terbangunnya sumur bor pertanian	1 Paket			50,000,000													
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga					9,000,000													
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Terbinanya penyandang difabel	1 Paket			9,000,000													
4.6	Sub Bidang Dukungan Pemananan Modal					6,900,000													
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemda)	Meningkatnya pengelolaan BUM d	1 Paket			6,900,000													
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian					42,955,245													
4.7.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Lancarnya kegiatan pasar desa	1 Paket			39,055,000													
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi pro	Meningkatnya usaha ekonomi pro	1 Paket			3,900,245													
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES					128,911,400													
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana					24,511,400													
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Penanggulangan bencana berjalan	1 LS			24,511,400													
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak					104,400,000													
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	Penanganan keadaan Mendesak b	12 Bulan			104,400,000													
	JUMLAH BELANJA					2,171,938,632													
	SURPLUS / (DEFISIT)					38,165,708													

3.	PEMBIAYAAN																	
6.1.	Penerimaan Pembayaan	108,165,708			108,165,708	100%	3,262,624			83,642,245	3,077,601	16,700,100		385,375				1,097,763
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	108,165,708			108,165,708	100%				50,000,000								
6.2.	Pengeluaran Pembayaan	70,000,000			50,000,000	71%												
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	70,000,000			50,000,000	71%												
	PEMBIAYAAN NETTO	38,165,708			58,165,708	152%												
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00			117,552,350		1,250,248			102,561,495	4,733,973	7,289,820		302,875				1,413,939

Kabupaten Gunungnglegi, 26 Januari 2024



LAMPIRAN III
 PERATURAN KALURAHAN NGLEGI
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA TA 2023

Kalurahan : Nglegi
 Kapanewon : Patuk
 Kabupaten : Gunungkidul
 Provinsi : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Program	Kegiatan			Anggaran		
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000Ha dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan di BD Sri Tukul	Padukuhan Nglegi	215	Meter	Rp 138,879,000	APBD Kabupaten/ DPUPR Kabupaten
2	Pembangunan Talud Jalan Ruang Bobung-Ngalang PIWK Wilayah Nglegi	Pembangunan	Padukuhan Nglegi	50	Meter	Rp 111,400,000	APBD Kabupaten/ DPUPR Kabupaten
3	Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Kalurahan Nglegi Patuk	Peningkatan	Padukuhan Nglegi	175	Meter	Rp 178,250,000	APBD DPUP dan SDM Provinsi

